

# MANAJEMEN SYARIAH IMPLEMENTASI MELALUI PENDIDIKAN

Oleh  
Sentot Imam Wahjono<sup>\*)</sup>

## Abstraks

Tujuan dari tulisan ini adalah mempercepat pemasyarakatan penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun pemasyarakatan ekonomi syariah itu telah dimulai tahun 1992, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dan kemudian diperkuat dengan diundangkannya UU No 23 tahun 1999 dan terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga bank konvensional, yang merupakan fondasi perbankan syariah. Namun kontribusi perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih kecil, 1,8% dari Assets. Demikian pula share asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, masih sangat kecil. Untuk mempercepat penerapan ekonomi syariah diperlukan upaya-upaya sistemik dan mendasar yang diharapkan dapat membentuk pola pikir dan perilaku syariah sebelum memasuki dunia kerja bahkan semenjak sekolah dasar. Oleh karena itu harus dimulai dari Pendidikan Tinggi dengan kurikulum murni syariah, ke depan dengan tenaga dosen yang murni syariah.

## I. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 208.819.860 orang atau 87,196 % dari seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 182.083.594 orang (Badan Pusat Statistik 2005). Sementara itu Penguasaan Asset Produktif (GNP) adalah sebagai berikut: 58% GNP dikuasai oleh konglomerat, 24% GNP dikuasai oleh BUMN yang berjumlah 158, 10% GNP disumbangkan oleh Koperasi dan sektor formal, dan sisanya 8% GNP terdapat di Usaha Kecil dan sektor informal yang berjumlah 33,5 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara piramida penduduk Indonesia dengan piramida penguasaan asset produktif (Antonio, 2007).

Penyebab utama dari kontradiksi ini adalah terlalu lamanya bangsa Indonesia mampu keluar dari belenggu peraturan-peraturan yang dibuat Belanda pada masa kolonial. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, namun kemerdekaan itu masih semu, yang merdeka adalah secara politik dan fisik saja dalam arti pemerintahannya sudah dipimpin oleh anak negeri, politiknya sudah disuarakan oleh anak bangsa, namun banyak peraturan mendasar dalam berbangsa dan bernegara masih mengkhianatkan diri untuk dijajah. Coba kita lihat Oendang-Oendang Dasar 1945, Atoeran Peralihan, Pasal II, yang bunyinya : *"Segala Badan Negara dan Peratoeran jang ada, masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini"*.

---

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap FE UM Surabaya, Lektor, Alumni S-2 Unair

Disektor ekonomi "Badan Negara dan Peraturan" warisan dari pemerintah Hindia Belanda adalah perbankan dengan segala peraturannya yang jelas dengan mengenakan *interest* dalam bahasa Inggris atau *rente* dalam bahasa Belanda.

Rente ini kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia diperkirakan hingga tahun 1983. Dari sejak kemerdekaan hingga 1 Juni 1983, rente bank diatur oleh Pemerintah. Pada waktu itu banyak para ahli ekonomi dan ulama yang menganggap rente bank bukan riba karena pemerintah yang mengatur. Namun ketika pemerintah meluncurkan kebijakan Sistem Devisa Bebas pada tahun 1970 perekonomian Indonesia menjadi terbuka dari pengaruh ekonomi luar negeri. Rente bank di Indonesia yang kaku menjadi dihadapkan dengan rente bank di luar negeri yang lebih dinamis. Akibatnya timbul rente uang gelap yang lebih bersaing dari rente bank di luar negeri. Orang atau badan yang merentekan uang secara gelap ini lalu dijuluki "rentenir" atau "lindah darat" (Perwataatmadja, 2007).

Adanya dua rente dipasar uang yaitu rente resmi bank dan rente gelap menimbulkan kerugian pada bank yang kemudian selisihnya disubsidi oleh pemerintah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Akibatnya bank menjadi sangat tergantung kepada subsidi pemerintah dan menjadi tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi perbankan akhirnya pemerintah meluncurkan kebijakan 1 Juni 1983 (Deregulasi 1983) yang isinya pemerintah melepaskan penentuan tingkat rente bank dan diserahkan kepada banknya sendiri. Waktu itu muncul istilah "bunga" untuk menggantikan istilah rente yang telah tercemar oleh para rentenir dan lindah darat. Istilah bunga menjadi sangat populer apalagi setelah pemerintah meluncurkan kebijakan 27 Oktober 1988 atau Paket Oktober 1988 yang isinya membuka perizinan bank seluas-luasnya. Indonesia menjadi surga bagi para investor dalam maupun luar negeri untuk mendirikan bank.

Menjamurnya bank-bank konvensional ditambah dengan GDP nyata tahunan yang tumbuh rata-rata mendekati 7% dari [1987-1997](#) telah mengangkat citra bank konvensional setinggi-tingginya tetapi ketika terjadi krisis finansial [Asia Tenggara](#) yang merambah ke Indonesia pada akhir [1997](#) yang dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi menghempaskan citra bank konvensional ke tingkat serendah-rendahnya. Pemerintah yang khawatir akan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri kepada sektor perbankan di Indonesia telah mengeluarkan biaya penyelamatan dan pemulihan industri perbankan hingga mencapai lebih dari 50% PDB Indonesia pada waktu itu atau lebih dari Rp 500 triliun termasuk didalamnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Rekapitalisasi Perbankan (Hadad, 2003).

## II. MANAJEMEN SYARIAH ?

Kalau kita mau jujur, maka sistem perekonomian yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda yang didominasi perbankan konvensional dengan menguasai rata-rata lebih dari 90% jumlah uang yang beredar (M2) sejak tahun 1994 itu telah gagal memakmurkan bangsa Indonesia. 61 tahun Indonesia merdeka dengan pemerintahan yang silih berganti tetapi dengan tetap menggunakan sistem perekonomian warisan Belanda dan didominasi perbankan konvensional itu tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Data publikasi *Central Intelligence Agency* (CIA) menyebutkan estimasi tahun 2006 tingkat pengangguran 12,5% dari jumlah penduduk yang besarnya 245,452,739 orang dan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan mencapai 17,8% dari jumlah penduduk.

Dari latar belakang sejarah yang diuraikan diatas, baik yang bersifat universal maupun nasional menunjukkan perlunya kita kembali kepada sistem perekonomian yang sesuai dengan seperangkat nilai Islami (*Islamic set of values*) yang dimiliki oleh mayoritas penduduk suatu bangsa. Penyimpangan terhadap *Islamic set of values* secara universal telah menimbulkan kemunduran dan kemiskinan.

Di Indonesia pesan ini sudah sangat jelas berupa kegagalan dalam menghapuskan bahkan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 61 tahun merdeka sudah cukup menjadi bukti sejarah sistem perekonomian yang didominasi sistem ribawi tidak cocok untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penyesuaian sistem perekonomian dengan *Islamic set of values* sama sekali tidak bertentangan dengan *set of values* agama-agama lainnya di dunia. Dengan demikian upaya untuk menyesuaikan sistem perenominian Indonesia dengan *Islamic set of values* sebenarnya adalah untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Nilai-nilai islam yang diacu dalam pengembangan manajemen syariah adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad sehari-hari yaitu: *shiddiq* (benar & jujur), *amanah* (terpercaya), *fathanah* (cerdas), dan *thabligh* (komunikatif). Ke-empat sifat utama Muhammad inilah yang dipraktekkan saat beliau menjadi pedagang jauh hari sebelum diangkat menjadi seorang Nabi, artinya ke-empat sifat itu adalah manusiawi (bisa ditiru oleh manusia biasa). Kalau sekarang kita diperkenalkan dengan konsep *Good Corporate Governance* (Tata kelola Perusahaan yang Baik) yang terdiri dari *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *morality*. Sebenarnya antara *shiddiq*, *amanah*, *fathanah*, *thabligh* dengan *fairness*, *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *morality* mempunyai maksud yang sama yaitu memandu manusia agar terhindar dari sifat-sifat hewani yang serakah dan mencegah manusia terjerembab ke tempat yang serendah-rendahnya – *asfala saafiliin* (QS: 95/5).

Rachbini (2007) menyatakan bahwa peluang implementasi manajemen syariah di Indonesia sangat tinggi karena: **Faktor sosial-budaya** (jumlah penduduk yang relatif sangat banyak, lebih dari 220 juta, taraf pendidikan pada tingkat rata-rata relatif rendah lebih cocok dengan pola manajemen syariah), **Faktor agama** (mayoritas penduduk beragama Islam sehingga sentimen normatif merupakan peluang yang baik, Adanya kelompok fanatis terhadap norma menjadi pasar yang khusus, sebagai konsumen yang sangat loyal), **Faktor ekonomi** (tingkat pendapatan yang masih relatif rendah, lebih “pas” dengan pola dan prinsip-prinsip manajemen syariah).

### III. MANAJEMEN KEUANGAN / PERBANKAN SYARIAH

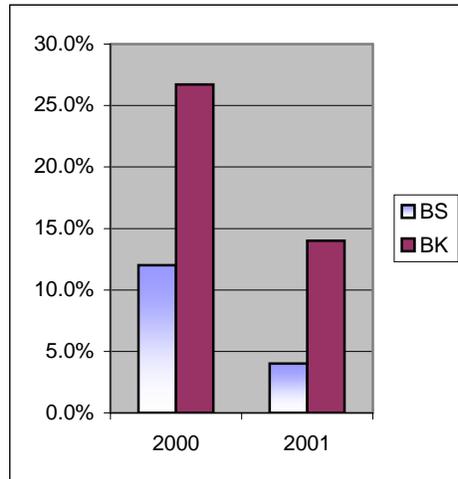
Banyak orang yang masih mempertanyakan “apa yang salah dengan sistem perbankan konvensional ?” karena di negara-negara lain terutama yang telah maju perbankan konvensional telah benar-benar menjadi penggerak perekonomian. Jawabannya tidak lain karena di negara lain itu perilaku penduduknya tidak dibentuk untuk mencintai bunga atau riba. Tengoklah disana *rate of interest* (tingkat riba) tidak pernah lebih dari 5% per tahun dan pendapatan perbankannya lebih dari 60% berasal dari jasa-jasa (*fee based income*). Bagi masyarakat disana bank benar-benar menjadi tempat yang aman untuk menyimpan uang, dan bukan tempat untuk menggandakan uang.

Mengapa kita memilih perbankan sebagai pintu masuk dalam mengenalkan manajemen syariah ? jawabannya adalah karena lebih dari 90% jumlah uang yang beredar (M2) berada di sektor perbankan dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito (DPK) maka sangat strategis untuk mensyariahkan dulu perbankan, kemudian lembaga keuangan yang lain, seperti: asuransi, pegadaian, dan pasar modal. Bila sektor keuangan yang menguasai hajat hidup banyak perekonomian dapat disyariahkan, insya Allah sektor-sektor yang lain dapat juga disyariahkan. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kata-kata “syariah” yang dipilih bukan islam, padahal maksudnya adalah “manajemen islam”, “perbankan islam”, dan lain-lain. Bahkan kata-kata syariah dalam konteks internasional tidak begitu familiar. Pilihan kata syariah adalah strategis untuk melunakkan kaum abangan (meminjam istilah Gertz) agar tidak *su'udzon* dan secara apriori menolak konsep ekonomi syariah yang telah terbukti handal diterapkan dinegara manca.

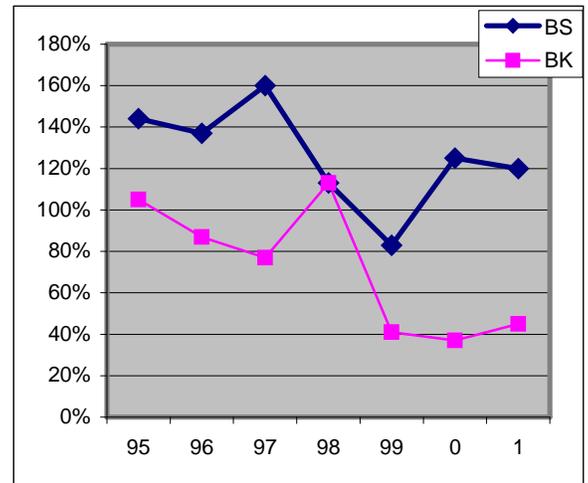
Keberhasilan perbankan syariah telah ditunjukkan saat bangsa Indonesia sedang mengalami aneka macam krisis yang dimulai dari krisis moneter mulai paruh kedua tahun 1997. Saat itu tidak ada satu bank konvensionalpun yang dapat lolos dari sergapan krisis moneter. Semua bank konvensional mengalami kerugian yang amat sangat. Semua bank konvensional berada dalam lembah kebangkrutan yang hanya bisa diselamatkan oleh suntikan dana dari bank sentral dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Selama masa krisis tersebut semua bank konvensional mengalami *negatif spread* dan membengkaknya kredit bermasalah (NPL = *Non Performing Loan*). Berbeda dengan kondisi bank konvensional, bank syariah justru berhasil membuktikan dirinya sebagai sistem perbankan yang tahan terhadap krisis moneter (Marina, 2005). Data statistik menunjukkan bahwa:

1. NPL bank syariah lebih rendah dan mengalami proses *recovery* yang lebih cepat dibanding bank konvensional pada masa krisis, seperti terlihat pada gambar 1.
2. LDR bank konvensional menurun berada pada level dibawah 50% sedang bank syariah telah kembali diatas 100%, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 1**  
Perbandingan NPL antara Bank Syariah dan Bank Konvensional



**Gambar 2**  
Perbandingan LDR antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber: BI, 2002, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, hal.6.

#### IV. MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH

Marketing Syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada *stakeholders*-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islami (Sula, 2007)

Meskipun manajemen syariah pada umumnya tunduk pada kaidah-kaidah manajemen pemasaran namun sebagai manifestasi agama islam, manajemen pemasaran syariah harus mengandung unsur-unsur moralitas keagamaan seperti jujur, adil dan transparan. Ketiga hal itulah yang disebut etika bisnis. Ahmad (2001) menyebutkan sedikitnya terdapat enam ciri etika bisnis dalam Islam yaitu: Kerja, Jujur, Kebebasan dalam Usaha Ekonomi, Keadilan dan Perlindungan, Murah hati, dan Berdagang bukan Riba. Demikian pula Qardhawi (2001) juga mendefinisikan bahwa bisnis dalam islam harus dipandu dengan etika yang setidaknya terdiri dari: Bekerja Sendi Utama Produksi, Bereproduksi dalam lingkaran Halal, Perlindungan Kekayaan Alam, Mewujudkan Swadaya, dan Merealisasikan Swasembada.

Ilmu ekonomi tidak dapat mengakomodasi moral, kecuali secara sadar dikembangkan norma dan aturan main yang baik (Rachbini, 2007). Dalam hal ini diperlukan etika dalam aktivitas bisnis agar manusia terhindar dari sifat binatang (*homo economicus*). Sebagai contoh: manusia diperbolehkan / dianjurkan untuk berdagang agar memperoleh keuntungan. Pertanyaannya adalah bolehkan kita berjualan ganja ? kalau patokan berdagang harus untung, maka tidak ada bedanya berdagang beras dengan ganja. Disinilah letak etika dalam memandu aktivitas bisnis manusia. Islam melarang bisnis dengan karakteristik sebagai berikut: *gharar* (tidak jelas), *maisir* (judi), *riba*, *tathfif* (curang), *dzalim* (aniaya), *risywah* (sogok), dan maksiat (Sula, 2007).

#### V. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SYARIAH

Manajemen sumber daya manusia syariah akan mengemuka saat rekrutmen, pengorganisasian, motivasi, kepemimpinan, dan kompensasi. Dalam rekrutmen harus dihindari terjadinya kolusi dan nepotisme. Saat pengorganisasian harus dilakukan dengan rapi, baik dan benar (*“Ali bin Abi Thalib berkata: “Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi, akan dikalahkan oleh kebathilan dan kejahatan yang diorganisir dengan rapi.”*). Demikian pula saat pembagian wewenang, perlu disadari masing-masing manusia mempunyai potensi dan kemampuan berbeda yang unik, oleh karena itu pelimpahan tugas dan wewenang jangan sampai melebihi kemampuan seseorang (*Laa yukallifullahu nafsan illa wus aha*, QS: Al Baqoroh, 286). Bantuan ilmu psikologi bisa digunakan untuk mengetahui potensi, sifat dan karakter seorang karyawan secara ilmiah (Muslich: 2004, 123).

Dalam lingkungan organisasi Islami, pemotivasian harus didasarkan pada prinsip keikhlasan. Hafiduddin (2007) menyatakan bahwa ikhlas berarti melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang bersih. Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah SWT sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itiqan (tepat, terarah, profesional, jelas dan tuntas).”* (HR. Thabrani).

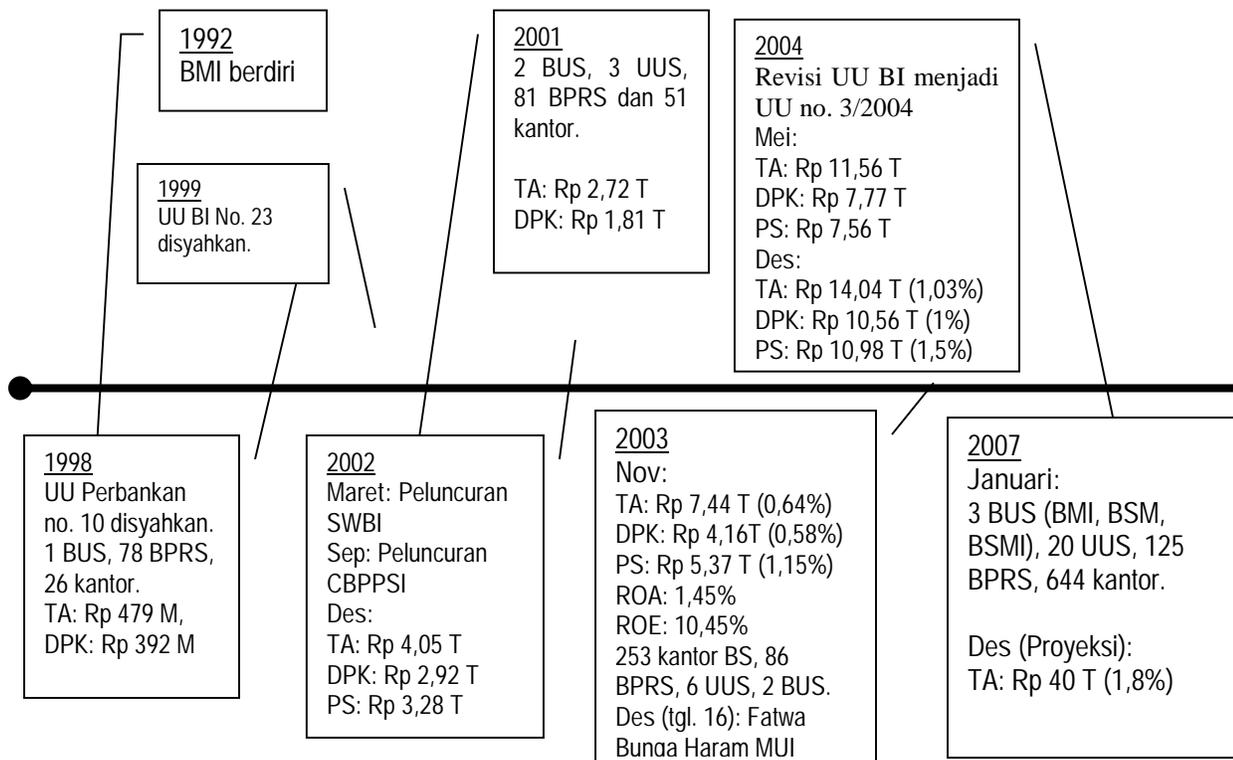
Prinsip keikhlasan akan berimbas kepada prinsip kompensasi. Meskipun Allah menuntun manusia untuk tidak menuntut hak meskipun telah berbuat sebaik-baiknya (*“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”* (QS. Al-Isra’: 84), namun terdapat tuntunan yang jelas bahwa manajemen dilarang berbuat aniaya misalnya membayar gaji kurang dan telat (*“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Ankabut: 69).

## VI. IMPLEMENTASI MELALUI PENDIDIKAN

Deliarnov (1995) mengatakan bahwa bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa (negara, atau sekelompok masyarakat) tidak hanya tergantung dari doktrin, mazhab, atau aliran pandangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai (*set of values*) yang dianut oleh bangsa atau kelompok masyarakat tersebut, seperti adat, kebiasaan, norma-norma, kepercayaan, ideologi dan falsafah. Berangkat dari pemikiran ini maka sudah sewajarnya bangsa Indonesia saat ini berharap dari generasi berikutnya, bukan dari generasi sekarang untuk mengimplementasikan manajemen syariah. Tugas generasi sekarang adalah menyiapkan seperangkat sistem yang memungkinkan implementasi manajemen syariah. Salah satunya adalah dengan menyiapkan pendidikan syariah.

Marina (2005) menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu alat dakwah persyarikatan Muhammadiyah ber *“amar ma’ruf nahi munkar”* merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsinya bagi percepatan pengembangan perbankan syariah. Salah satu sumbangsinya itu adalah upaya perumusan kurikulum perbankan syariah yang *massive* (meluas), *fundamental* (mendasar), *comprehensive* (menyeluruh), dan *visioner* (berpandangan jauh ke depan). Kebutuhan pengembangan Kurikulum Bermuatan Syariah juga dirasakan oleh Perwataatmadja (2007). Polesan kurikulum pendidikan ekonomi konvensional dengan beberapa muatan yang berbau syariah tidaklah cukup, tetapi sebagai langkah awal untuk memulai pendidikan ekonomi syariah sudah sangat mendesak. Urgensi kurikulum syariah itu mengingat perkembangan pesat amal usaha ekonomi syariah di bidang perbankan, asuransi, pegadaian, dan pasar modal syariah. Gambaran perkembangan perbankan syariah bisa dilihat dalam gambar dibawah.

**Gambar 3**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**



**KETERANGAN:**

BMI	Bank Muamalat Indonesia	SWBI	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
BSM	Bank Syariah Mandiri	CBPPSI	Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia
BSMI	Bank Syariah Mega Indonesia	UUS	Unit Usaha Syariah (dalam bank konvensional)
PS	Pembiayaan Syariah (kredit)	TA	Total Assets
DPK	Dana Pihak Ketiga	BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUS	Bank Umum Syariah		

## PENJABARAN FORMAT KURIKULUM

<p><b>A.</b> Himpunan telaah tentang dasar-dasar ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memahami proses creative-integratif dai epistemology taufidi, aksiomatik dan asumsi-asumsi dalam Ekonomika Islami;</li> <li>2. mengetahui sejarah pemikiran Ekonomika Islami;</li> <li>3. memahami prinsip-prinsip Ekonomika Islami dan usul fiqh.</li> </ol>	<p><b>I. Mata Kuliah Dasar (MKD)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tafsir Maudhu'i Ekonomi I</li> <li>2. Hadis Maudhu'i Ekonomi I</li> <li>3. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam</li> <li>4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam</li> <li>5. Ushul Fiqh</li> <li>6.</li> </ol>
<p><b>B.</b> Himpunan telaah tentang teori, fiqh, dan hukum bisnis serta penerapannya dalam kegiatan ekonomi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memahami teori Ekonomika Islami sekaligus dengan pengetahuan tentang ekonomi konvensional;</li> <li>2. memahami fiqh muamalat dan hukum bisnis;</li> <li>3. memahami seluk beluk manajemen strategis.</li> </ol>	<p><b>II. Mata Kuliah Konsentrasi (MKK)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori-Teori Ekonomi Islam dan Konvensional</li> <li>2. Fiqh Muamalah</li> <li>3. Hukum Bisnis Positif</li> <li>4. Manajemen Strategis</li> <li>5.</li> </ol>
<p><b>C.</b> Himpunan telaah tentang metodologi untuk menganalisis Ekonomika Islam.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempertajam analisis Ekonomika Islami untuk menyusun tesis dan disertasi serta menulis laporan;</li> <li>2. memahami metodologi penelitian untuk menyusun permasalahan, metode pemecahannya, dan perumusan kebijakannya;</li> <li>3. mengerti dan memahami matematika dan statistik</li> </ol>	<p><b>III. Mata Kuliah Penunjang (MKPe)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodologi Penelitian</li> <li>2. Seminar Proposal Tesis / Desertasi</li> <li>3. Matematika dan Statistik Ekonomi</li> <li>4.</li> </ol>
<p><b>D.</b> Himpunan telaah tentang bunga rampai kontekstual Ekonomika Islami dalam berbagai kelembagaan, seperti : konsumsi, tabungan, investasi, zakat, waqf, haji, dan lain-lain</p>	<p><b>IV. Mata Kuliah Pilihan (MKPi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Keuangan Syariah Bank</li> <li>2. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank</li> <li>3. Ekonomi Pembangunan</li> <li>4. Kebijakan Moneter</li> <li>5. Kebijakan Fiskal</li> <li>6. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer</li> <li>7. Akuntansi Syariah,</li> <li>8.</li> </ol>

Sumber: Perwataatmadja, Karnaen A., 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, 2001, *Business Ethics in Islam*, Diterjemahkan Oleh Samson Rahman, Penerbit Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Shariah: New Management Paradigm and Global Competitiveness*, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret).
- Deliarnov, 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2007, *Nilai-nilai Syariah dalam Budaya Corporasi bagi Pembentukan Keunggulan Organisasi*, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret).
- Hadad, Muliaman D., dkk, 2003, *Indikator Awal Krisis Perbankan*, Riset Terkait Sistem Keuangan, Bank Indonesia, Desember, Jakarta.
- Marina, Anna, 2005, Peranan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Dalam Mempercepat Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Balance Journal*, Tahun II/Nomor 4/Juli, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya,.
- Muslich, 2004, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta
- Perwataatmadja, Karnaen A., 2007, *Kebutuhan dan Strategi Pengembangan Kurikulum Manajemen Bermuatan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret).
- Rachbini, Didik J, 2007, *Peluang Penerapan Manajemen Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret).
- Sula, Muhammad Syakir, 2007, *Syariah Marketing: Solusi Penciptaan Bisnis Beretika*, Makalah Seminar Nasional Manajemen Syariah, Universitas Mercu Buana Jakarta (Maret).
- Qardhawi, Yusuf, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, edisi bahasa Indonesia, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta